

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Abbas, H. C. (2018). *Koordinasi Laporan Dalam Meningkatkan Efektivitas Organisasi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung*. 4(3).
- Bahnar, N. H., & Kadir, A. G. (2019). Analisis Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2).
- Barru, B. P. S. K. (n.d.). *Statistik Keuangan Kabupaten Barru*.
- Diyah Ayu Pangestuti, Dra. Maesaroh, M. S. (2018). *Efektivitas Organisasi Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Parkir Di Kota Semarang*. Volume 7,.
- Gambaran Umum Kabupaten Barru*. (n.d.).
- Gibson, I. D. (1997). *Organisasi: Perilaku Struktur Proses*. (Jilid II.). Jakarta, Binarupa Aksara.
- Handyaningrat, S. (1990). *Pengantar Study Administrasi Dan Manajemen*. CV Haji Masagung.
- Haning, M. T., Hasniati, & H.Tahili, M. (2018). Peningkatan Public Trust dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. *Spirit Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret*, 13(2), 62–71.
- Hidayat. (1986). *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Indonesian, A., Study, C., Yani, A. A., & Ahmad, S. (2017). *Public Service Performance and Public Trust in Government*. 43(Icas), 86–89.
- Julastiana, Y., & Suartana, I. W. (2013). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Bali*, Volume 2 N.
- Kasim, A. (1989). *The organizational effectiveness of a public university: The University of Indonesia as a case study*.
- Katz, D., & Kahn, R. L. (1966). *The Social Psychology of Organizations*,. John Wiley & Sons. Inc., New York.
- Khadafi, R., & Mutiarin, D. (2017). Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten

- Gunungkidul. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2).  
<https://doi.org/10.18196/jgpp.4280>
- Kilmann, R. H., & Herden, R. P. (1976). Towards a systemic methodology for evaluating the impact of interventions on organizational effectiveness. *Academy of Management Review*.
- Lubis, H., & Huseini, M. (1987). *Teori Organisasi*. Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Lynn, L. E., & Robichau, R. W. (2013). Governance and organisational effectiveness: Towards a theory of government performance. In *Journal of Public Policy* (Vol. 33, Issue 2).  
<https://doi.org/10.1017/S0143814X13000056>
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFY Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. CV ANDI. Yogyakarta.
- Miles B, M., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*.
- Pasolong, H. (2010). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Permata, S., & Harfiani. (2018). Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1),(urnal Adz-Dzahab: Jurnal), 51–78.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v4i1.103>
- Revida, E., Hidayatulloh, A. N., Soetijono, I. K., Hermawansyah, A., Purba, B., Tawakkal, M. I., ... & Asmarianti, A. (2020). *No Title*. Yayasan Kita Menulis.
- Schermerhorn Jr, J. R., Bachrach, D. G., & Wright, B. (2020). *Management*. John Wiley & Sons.
- Scott, W. R. (2003). Organizations: Rational, Natural, and Open Systems. In *Biotechniques* (Vol. 30, Issue 1).  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20431354>
- Siagian, S. P. (2003). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi aksara.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada.

Starawaji. (2009). *Pengertian Efektivitas*.

Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. erlangga.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. (n.d.). *Pemerintahan Daerah* (p. 2014).

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2000). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Waterman, R. H., & Peters, T. J. (1982). *In search of excellence: Lessons from America's best-run companies*. New York: Harper & Row.

Zulfikar, A. I., & Rahman, A. (2019). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Barru. *Sentralisasi*, 8(1)(18-32.).

**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan SULTAN HASANUDDIN NO. 19 Kode Pos 90711  
Telepon/Fax : (0427) 21274, e-mail : itda.barru@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR : 20 Tahun 2019**

**TENTANG**

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

- Menimbang** : Dalam rangka penyempurnaan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru, perlu menetapkan Keputusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah ;  
6. Peraturan Bupati Barru Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 46).  
7. Keputusan Bupati Barru Nomor 300/BAPENDA/VI/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN BARRU

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan tugas pembantu Daerah di bidang Pendapatan Daerah
3. Fungsi :
  - a. Perumusan pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi
  - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan dan Pengembangan
  - c. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
  - d. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Panagihan, Pembukuan, dan Pelaporan;
  - e. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Daerah	Terbitnya Administrasi dan Keuangan	% Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dalam setahun <hr/> Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dalam Tahun sebelumnya X 100%	Laporan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Laporan Pengadaan, Laporan Keuangan SKPD, Laporan Money	Subag Umum, Sub Bagian Program dan keuangan



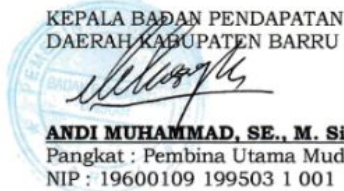
Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barru  
Pada tanggal : 14 Januari 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN BARRU



**ANDI MUHAMMAD, SE., M. Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19600109 199503 1 001

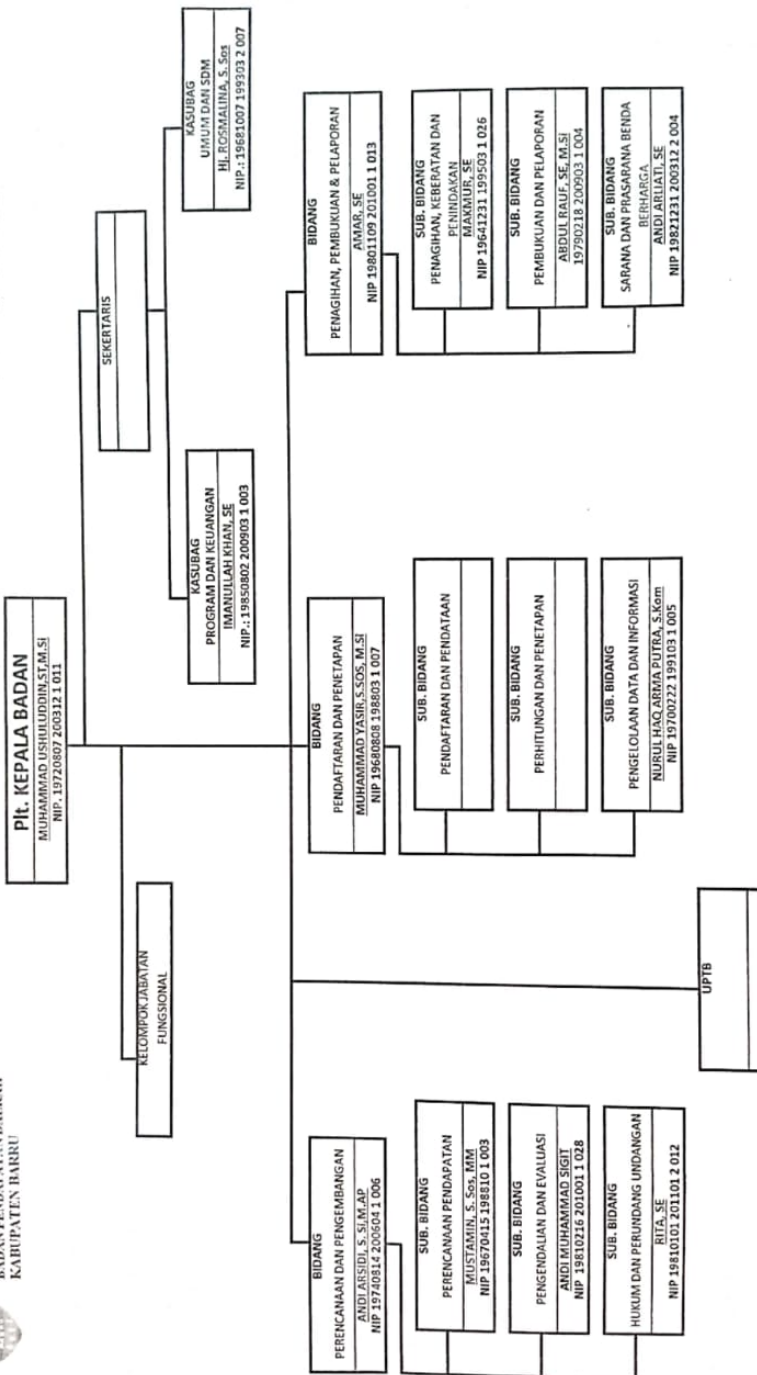
**Tembusan :**

1. Bupati Barru, di Barru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barru, di Barru;
3. Peringgal.



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA  
KERIA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BARRU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR : 68 TAHUN 2016  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2016



BUPATI BARRU

TTD

SUARDI SALEH

LAMPIRAN V:

**KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL**

: BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NAMA SKPD : 1).  
URUSAN YG DISELENGGARAKAN : 2).  
3).

NO	NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				JML	KETERANGAN	
		ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III			PIM IV
1	Kepala Badan	V																					1	*j) Beri tanda "v" bagi jabatan yang terisi
2	Sekretaris	0	x																				1	**j) Beri tanda "x" bagi jabatan yang tidak terisi
3	Kasubag Program dan Keuangan	V																					1	
5	Kasubag Umum	V																					1	
6	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	V																					1	
7	Kasub. Bidang Perencanaan Pendapatan	V																					1	
8	Kasub. Bidang Pengendalian dan Evaluasi	V																					1	
9	Kasub. Bidang Hukum & Perundang Undangan	V																					1	
10	Kabid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	V																					1	
11	Kasub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan	V																					1	
12	Kasub. Bidang Perhitungan dan Penetapan	0	x																				1	
13	Kasub. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	V																					1	
14	Kabid Pengajian, Pembinaan dan Pelaporan	V																					1	
15	Kasub. Bid. Pengajian, Keberatan & Penindakan	V																					1	
16	Kasub. Bidang Pembinaan dan Pelaporan	V																					1	
17	Kasub. Bid. Sarana & Prasarana Benda Berharga	V																					1	
18	Fungsional	V																					1	
19	Staf																						14	
	Total			0	1	9					4												1	
											11	6											1	
																							3	
																							10	
																							28	

Barru, 31 Desember 2020

Mengetahui,  
Pjt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

**MUHAMMAD USHULUDDIN, St, M.Si**  
NIP. 19720807 200312 1 011

**DAFTAR RINCIAN PEJABAT STRUKTURAL TAHUN 2020**

INSTANSI : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NO	NAMA PEGAWAI STRUKTURAL			PANGKAT	GOL	PENDIDIKAN	NAMA JABATAN	KETERANGAN
	ESELON II-b	ESELON III-a	ESELON III-b					
1	Muhammad Ushukuddin, ST, M.Si							
2		Kosong						
3								
4								
5		Andi Aridi, S.Si, M. AP						
6								
7								
8								
9		Muhammad Yasir, S. Sos, M.Si						
10								
11								
12								
13								
14		Amar, SE						
15								
15								

Barru, 31 Desember 2020

Mengetahui,

Pt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

**MUHAMMAD USHULUDDIN, ST, M.Si**

NIP. 19720807 200312 1 011



DPKD KABUPATEN BARRU		PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2										
SOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK												
No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
			Bagian Pelayanan PBB-P2	Petugas Pendataan dan Penilaian	Kepala Seksi PAD	Kepala Bidang Pendapatan	Petugas Pengolahan Data & Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output		
7.	LPAD digabungkan dengan berkas permohonan pendaftaran dan SPOP. Kemudian Petugas pelayanan PBB menyerahkannya kepada Petugas Pelayanan untuk dilakukan pencatatan dokumen.		A						LPAD, berkas permohonan pendaftaran, dan SPOP	15 menit	Pencatatan dokumen	
8.	Petugas Pelayanan PBB menyerahkan berkas kepada Petugas Pendataan dan Penilaian								LPAD, berkas permohonan pendaftaran, dan SPOP	15 menit	Pendistribusian dokumen	
9.	Petugas Pendataan dan Penilaian meneliti dan menilai objek dan subjek pajak di lapangan disertai dokumentasi								SPOP dan LSPOP	1 hari	Penelitian dan penilaian SPOP dan LPOP	
10.	Petugas Pendataan dan Penilaian menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan								SPOP dan LSPOP	10 menit	Berita Acara Penelitian Lapangan - Pembuatan Uraian Penelitian Berkas	
11.	SPOP dan LSPOP yang telah diteliti oleh Petugas Pendataan dan Penilaian ditandatangani kemudian diteruskan ke Kepala Seksi PAD dengan melampirkan Uraian Pemeriksaan Berkas								SPOP dan LSPOP yang telah diteliti, beserta Uraian Pemeriksaan Berkas	15 menit	Penandatanganan SPOP dan LPOP	
12.	Kepala Seksi PAD membubuhi paraf Uraian Pemeriksaan Berkas dan diteruskan ke Kepala Bidang Pendapatan ditandatangani								SPOP dan LSPOP yang telah diteliti, beserta Uraian Pemeriksaan Berkas	15 menit	Paraf Uraian Pemeriksaan Berkas	
13.	Kepala Bidang Pendapatan menandatangani Uraian Pemeriksaan Berkas dan dikembalikan kepada Petugas Pendataan dan Penilaian untuk diteruskan kepada Petugas Pengolahan Data Dan Informasi								SPOP dan LSPOP yang telah diteliti, beserta Uraian Pemeriksaan Berkas yang telah diparaf	10 menit	Penandatanganan Uraian Pemeriksaan Berkas	
14.	Petugas Pengolahan Data Dan Informasi melakukan Perekaman Data selanjutnya dokumen diserahkan kepada Petugas Pelayanan								SPOP dan LSPOP yang telah diteliti, beserta Uraian Pemeriksaan Berkas yang telah ditandatangani	30 menit	Perekaman data	

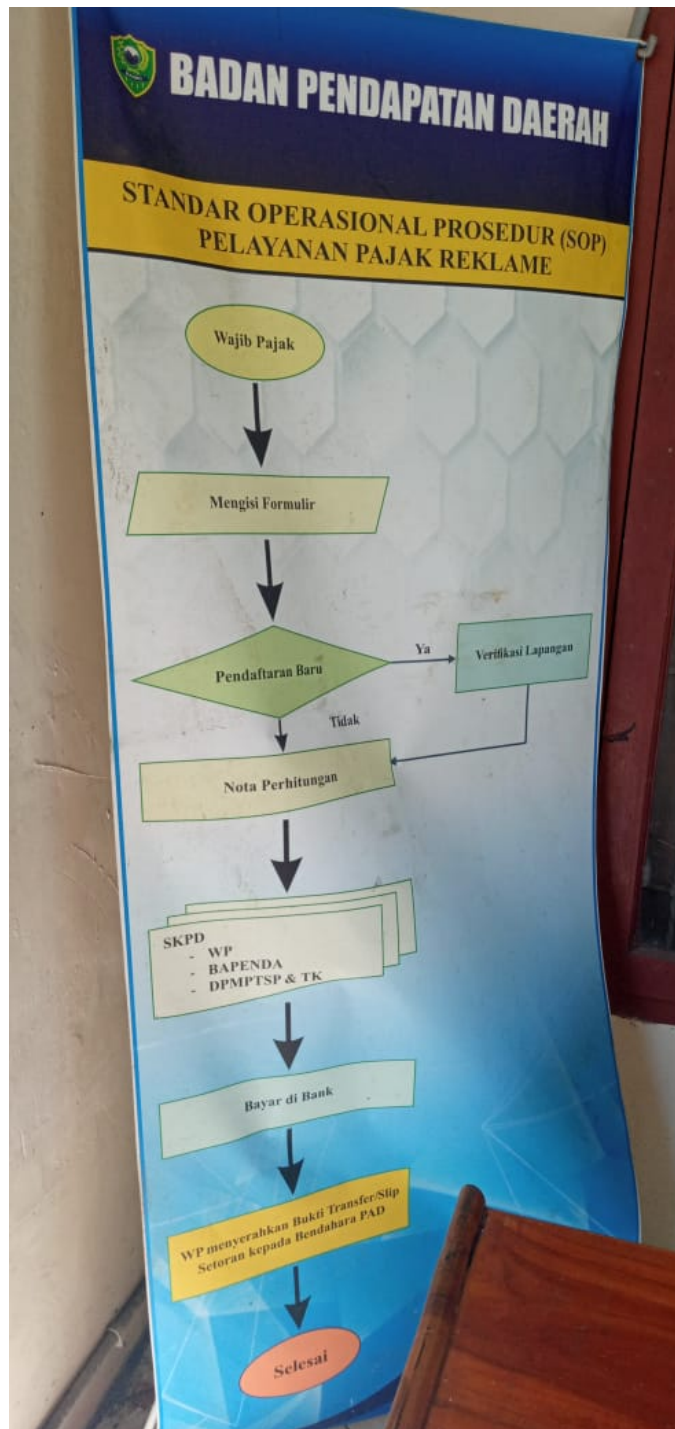
DPKD KABUPATEN BARRU		IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN											
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2													
No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
			Bagian Pelayanan PBB-P2	Petugas Pendataan dan Penilaian	Kepala Seksi PAD	Kepala Bidang Pendapatan	Petugas Pengolahan Data & Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output			
5.	Petugas Pengolahan data dan Informasi melakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)										10 menit	Pencetakan SPPT	
6.	Petugas Pengolahan data dan Informasi menyerahkan SPPT kepada Kepala Seksi PAD untuk diparaf										10 menit	Penyerahan SPPT	
7.	Kepala Seksi PAD menyerahkan SPPT kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diparaf dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.										10 menit	Penandatanganan SPPT	
8.	Petugas menatausahakan SPPT dan menyampaikan ke Petugas Pelayanan PBB untuk didistribusikan.										10 menit	Pendistribusian SPPT	
9.	Petugas Pelayanan PBB P2 menyampaikan SPPT kepada WP dengan menggunakan Tanda Terima										10 menit	Penyampaian SPPT	

Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Barru  
*[Signature]*  
**HANDI MUHAMMAD, SE, M.Si, C**  
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19600109 199503 1 001

Dokumentasi Penelitian:









DATA PAJAK RESTORAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
TAHUN 2021


NO	NAMA RUMAH MAKAN	ALAMAT RUMAH MAKAN	NIK	NPWP	NAMA PEMILIK	ALAMAT PEMILIK	NAMA PENGELOLA	KET
KEC BARRU								
RUMAH MAKAN								
1	GOYANG LIDAH	JL SULTAN HASANUDDIN	73110130403790002	74.384.409.4.802.000	MUSMULIADI	JL SULTAN HASANUDDIN	-	MPOS
2	SURYA ( PASAR )	PASAR MATTIROWALIE	-	-	H MARSUMIN	JL.A.P.PETTARANI	-	MPOS
3	BAROKAH INDAH	JL SULTAN HASANUDDIN	7311030205730003	08.294.700.3.802.000	SUGIANTO	JL SULTAN HASANUDDIN	-	MPOS
4	MELATI	JL MELATI	7311030201860003	15.879.078.2.802.000	FAHRUDDIN	JL MELATI	-	MPOS
5	AREMA	JL.A.P.PETTARANI	731103420280003	-	RUPIN	JL.A.P.PETTARANI	-	MPOS
6	COTO MAKASSAR	JL SULTAN HASANUDDIN	7305014107270046	-	RAJALAN DG NYARRANG	JL SULTAN HASANUDDIN	-	MPOS
7	OJO LAJU	JL SULTAN HASANUDDIN	7311031403580002	-	PRAYITNO	JL SULTAN HASANUDDIN	-	MPOS
8	PADAIDI	JL NIAGA	7311034507550003	07.709.385.4.802.000	HI SUBAEDAH	JL NIAGA	-	MPOS
9	DAPUR EMPANG	AMMARO	-	-	H USMAN	LASINRI	-	MPOS
10	CITRA MINANG	JL SULTAN HASANUDDIN	-	-	SURYA EFENDI	JL SULTAN HASANUDDIN	-	MPOS


DATA PAJAK HOTEL BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021

NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	ALAMAT	KET
1.	A.ARIANTI	HOTEL SAVIRA / 081342371982	JL.H.M.SEWANG COPPO	MPOS
2.	IR.HI.ANA ROHANA	HOTEL YOUTEFA / 04273230294	JL SULTAN HASANUDDIN COPPO	MPOS
3.	H.ANAS	PENGINAPAN CAHAYA GARESSI	JL.SULTAN HASANUDDIN GARESSI	
4.	H.AMIRUDDIN H	PENGINAPAN RHESKY	JL POROS MAKASSAR LIPUKASI	
5.	SYAHDAN	PENGINAPAN ASOKA INDAH	JL ASOKA TUWUNG KEC.BARRU	
6.	HJ SURIATI,5_Sos,5_Pd	PENGINAPAN BAGAS	JL ABD MUIS TUWUNG KEC BARRU	
7.	HJ ROSMIATI	PENGINAPAN INDOMAL 1	JL SULTAN HASANUDDIN, PEKKA KEC.TANETE RILAU	
8.	HJ ROSMIATI	PENGINAPAN INDOMAL 2	JL SULTAN HASANUDDIN, PEKKA KEC.TANETE RILAU	
9.	H SUNARDI	WISMA BOROBUUDUR I / 085398620877	JL.H.A ISKANDAR UNRU ,SUMPANG BINANGAE KEC .BARRU KAB.BARRU	MPOS
10.	H SUNARDI	WISMA BOROBUUDUR II / 08539862877	JL.R.A.KARTINI NO.7 KEL .SUMPANG BINANGAE, KEC BARRU KAB.BARRU	MPOS
11.	HJ.A.TJELLA	WISMA AYYUB / 085248838043	JL.BAU MASSEPE ,MANGEMPANG	MPOS
12.	YUSRIAL	WISMA AL KHOMRI	JL SULTAN HASANUDDIN	
13.	A.ZULFIKAR KAHAR	WISMA GENTING MAS	JL.BAU MASSEPE ,MANGEMPANG	
14.	SUARNI	RISKA ANUGRAH BERKAH	JL SULTAN HASANUDDIN COPPO	
15.	HJ ASTUTI	ARUMI SYARIAH GUEST HOUSE	JL SULTAN HASANUDDIN TUWUNG	

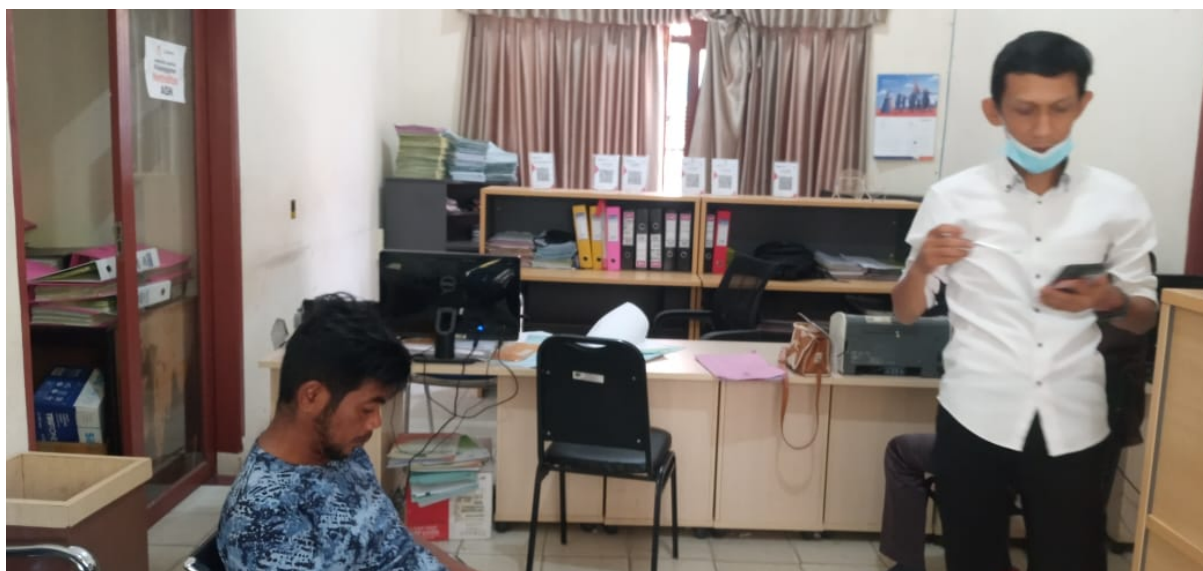
Pt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pendaftaran & Pendataan

  
**MUHAMMAD SHULUDDIN, ST, M.SI**  
NIP. 19720807 200312 1 011

  
**ANDI ABDUL HAKIM, SE**  
NIP. 19741013 199803 1 007









# BADAN PENDAPATAN DAERAH

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN BPHTB



### Ket: \* SYARAT-SYARAT PENGAJUAN BPHTB

#### ➤ BALIK NAMA KARENA JUAL BELI

1. Foto Copy KTP Pembeli
2. Foto Copy SPPT PBB
3. Foto Copy Sertifikat Tanah
4. Materai 1 Lembar Rp. 6.000,-

#### ➤ BALIK NAMA KARENA WARISAN

1. Foto Copy KTP yang diberi Warisan
2. Foto Copy SPPT PBB
3. Foto Copy Sertifikat Tanah
4. Surat Keterangan Ahli Waris
5. Surat Persetujuan Ahli Waris
6. Surat Kuasa Ahli Waris
7. Materai 1 Lembar Rp. 6.000,-

#### ➤ BALIK NAMA KARENA HIBAH WARIS

1. Foto Copy KTP yang diberi Hibah
2. Foto Copy SPPT PBB
3. Foto Copy Sertifikat Tanah
4. Foto Copy Akta Hibah
5. Materai 1 Lembar Rp. 6.000,-

#### ➤ PENERBITAN SERTIFIKAT BARU

1. Foto Copy KTP yang bersangkutan
2. Foto Copy SPPT PBB
3. Surat Ukur dari Kantor BPN
4. Jika Warisan:
  - Surat Keterangan Ahli Waris
  - Surat Persetujuan Ahli Waris
  - Surat Kuasa Ahli Waris
5. Materai 1 Lembar Rp. 6.000,-

\*\* Survey Lapangan dilakukan jika Nilai Transaksi sama dengan atau Lebih Rendah dari NJOP atau Nilai Pasar